

TANTANGAN *MEDIA CENTER* PADA TAHAP PERALIHAN: STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF KOMPONEN KELEMBAGAAN *MEDIA CENTER* KOTA DUMAI

THE CHALLENGES OF MEDIA CENTER DURING TRANSITION PERIOD: A QUALITATIVE DESCRIPTIVE STUDY OF INSTITUTIONAL COMPONENTS OF MEDIA CENTER IN DUMAI

Vience Mutiara Rumata¹ dan Annisa Rizkina Rosa²

¹Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik;

²Direktorat Pengelolaan Media Publik

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jln. Medan Merdeka Barat No. 9B, Jakarta Pusat

¹vien001@kominfo.go.id; ²anni004@kominfo.go.id

Diterima : 29 Januari 2018

Direvisi : 26 Maret 2018

Disetujui : 11 Mei 2018

ABSTRACT

Dumai is one of the major cities received media center peripheral grants from the Ministry of Communication and Information Technology in 2015. In the beginning of 2017, the Division of Communication and Information Technology of Dumai City Secretariat was established based on Mayor Regulation. As a result, the media center, which was previously run by the Dumai Transportation Department, was reassigned to this section. This article analyzes the challenges of media center examined from institutional components. The research design applied in this study is qualitative approach, in which the primary data were collected from in-depth interview with key informants who involved directly in the process of managing media center. Results of this study indicated that the local government has not been fully focused on concurrent programs. The main challenges in managing media center lies in lack of media center's institutional status, budget, and human resources. It is recommended that the Division of Communication and Information Technology's status be enhanced, to a Department type B and central government should intervene to ensure sustainability of the program.

Keywords: Feasibility, Media Center, Transition Period, Dumai City

ABSTRAK

Kota Dumai merupakan salah satu penerima bantuan perifer *media center* dari Kemkominfo pada tahun 2015. Awal tahun 2017, Bagian Kominfo Sekretariat Daerah Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota. Alhasil, pengelolaan *media center* yang sebelumnya menjadi tugas Dinas Perhubungan Kota, dialihkan ke Bagian Kominfo. Artikel ini mengkaji tantangan *media center* dari aspek kelembagaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara empat narasumber kunci yang terlibat dalam pengelolaan *media center* ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pimpinan daerah belum sepenuhnya memfokuskan perhatian pada kegiatan pemerintahan yang sifatnya konkuren. Tantangan utama pengelolaan *media center* adalah keterbatasan status lembaga, anggaran, hingga sumber daya manusia. Rekomendasi penelitian ini di antaranya adalah peningkatan status Bagian Kominfo menjadi Dinas Kominfo Tipe B dan adanya intervensi pemerintah pusat untuk keberlangsungan program ini.

Kata Kunci: Fisibilitas, *Media Center*, Periode Peralihan, Kota Dumai

PENDAHULUAN

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) merupakan *leading regulator* untuk sektor informasi dan komunikasi publik di Indonesia. Tugas dan fungsi pokok bidang ini berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP), yang salah satu fungsinya adalah “pelaksanaan pemberian evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik ...” (PM Kominfo No. 1 Tahun 2016, Pasal 506). Salah satu program Kominfo untuk mendukung fungsi tersebut adalah pembangunan *media center* (pusat media) di wilayah kabupaten dan kota. Kominfo telah menjalankan program *media center* sejak tahun 2007 dan hingga saat ini telah membangun *media center* di 171 lokasi (PM Kominfo No. 21 tahun 2016).

Kota Dumai merupakan salah satu penerima bantuan *media center* dari Kemkominfo pada tahun 2015. Penerima hibah *media center* ini kala itu adalah Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Dumai, Sub Bagian Pos dan Telekomunikasi. Hibah tersebut meliputi tujuh unit perangkat komputer, satu unit laptop, *printer*, *scanner*, serta paket internet untuk satu tahun (*Media Center Riau*, 2015). Akan tetapi, kemudian terjadi perubahan nomenklatur Organisasi Pemerintah Daerah di awal 2017, yang menyebabkan bagian Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Dumai dipisahkan dari bagian Humas. Akibatnya, fungsi *media center* dialihkan dari Dishub Kota ke Bagian Kominfo Setda. Berita acara serah terima telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 7 Agustus 2017. Di masa transisi

ini, fungsi *media center* menjadi kurang optimal karena terbentur pada masalah anggaran serta sumber daya pengelolanya. Berdasarkan data rekapitulasi berita dan foto infopublik.id yang diolah oleh Direktorat Pengelolaan Media Publik, kontribusi *Media Center* Kota Dumai di *website* www.infopublik.id tersebut terbilang sangat minim, yaitu hanya enam berita di tahun 2016. Bahkan, per Juni 2017, tidak ada satu pun berita yang muncul dari Media Center Kota Dumai. Berbeda halnya dengan *Media Center* Kabupaten Bengkalis, penerima bantuan perangkat media center tahun 2016 (*website* infopublik, 2016), yang berkontribusi aktif mengirim berita ke portal *infopublik* yakni empat berita di tahun 2016 dan 10 berita per Juni 2017.

Meski masih berada dalam masa transisi dari Dishub menuju Setda, *Media Center* Kota Dumai perlu dikaji fisibilitasnya sebagai media alternatif bagi publik dalam memenuhi kebutuhan informasinya. Oleh sebab itu, pertanyaan penelitian ini adalah “bagaimana fisibilitas *media center* dari sisi kelembagaannya di masa peralihan?”

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fisibilitas *media center* perintis dari sisi komitmen pengelola, dalam hal ini jajaran Pemerintah Kota Dumai. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pemangku kebijakan di lingkungan Ditjen IKP terkait keberlangsungan *media center* sebagai penyedia informasi publik di tingkat daerah.

Gagasan awal program *media center* adalah sebagai upaya mengembangkan jaringan pertukaran informasi antar lembaga pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan kementerian/lembaga negara agar komunikasi antara pemerintah pusat dan

daerah dapat dirajut kembali pasca diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah (Buku Pedoman Umum *Media Center* Ditjen IKP, 2011). Selain Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), *media center* merupakan salah satu jaringan diseminasi materi publikasi dalam tata kelola pelayanan informasi dan komunikasi publik (PIKP) Ditjen IKP Kominfo.

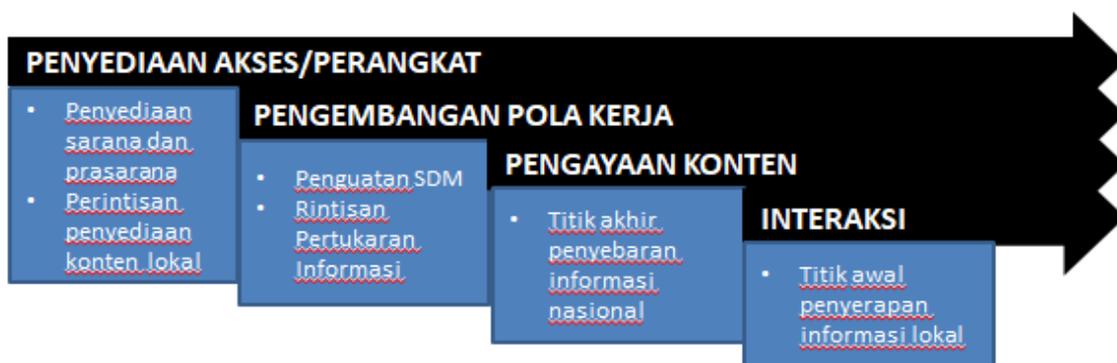
Media center memiliki tiga fungsi, yaitu:

- a. Fungsi Diseminasi, yaitu menyebarkan informasi publik, yang mencakup isu sektoral dan lintas sektoral;
- b. Fungsi Pertukaran Informasi, yaitu pembingkai konten isu-isu yang sifatnya lokal maupun isu-isu strategis bidang politik, hukum, dan keamanan, ekonomi dan kesejahteraan rakyat; dan
- c. Pusat Layanan Informasi dan Komunikasi Publik bagi masyarakat sekitar (Buku Pedoman Umum *Media Center* Ditjen IKP 2011).

Ditjen IKP telah menetapkan komponen kelembagaan yang dimiliki oleh *media center*, di antaranya:

- a. Komitmen pimpinan lembaga untuk mendukung sarana dan prasarana, termasuk komitmen pengelola untuk mempromosikan *media center* kepada masyarakat luas.
- b. Standar minimal sarana dan prasarana, seperti koneksi jaringan internet serta perangkat keras dan lunak.
- c. Standar minimal Sumber Daya Manusia pengelola, yang setidaknya memiliki kompetensi di bidang pengelolaan media informasi dan jejaring komunikasi sosial (seperti media sosial).
- d. Pembiayaan baik dari pemerintah pusat (Ditjen IKP) dan/atau APBD (Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota), ataupun yang melibatkan pihak swasta atau dunia usaha.

Secara umum, ada empat tahap pengembangan *media center*, yaitu: 1) tahap penyediaan akses/perangkat; 2) tahap pengembangan pola kerja; 3) tahap pengayaan konten; dan 4) tahap interaksi (lih. Gambar 1.)



Gambar 1. Tahapan Pengembangan *Media Center*

Sumber : Buku Pedoman *Media Center*. 2011.

Pada saat penelitian ini dilakukan, *Media Center* Kota Dumai tengah berada

dalam masa peralihan aset dari Dishub menuju Bagian Kominfo, Setdako.

Berdasarkan observasi di lapangan pada bulan September tahun 2017, *Media Center* Kota Dumai belum memiliki tempat permanen. Akan tetapi, pemerintah setempat telah mempersiapkan ruangan di sebelah perpustakaan daerah yang berlokasi di Jalan Tanjung Jati No. 1 Dumai. Lokasi ini direncanakan menjadi pusat pengelolaan data dan informasi tingkat kota. Bila dilihat dari tahapan pengembangan *media center* (lih. Gambar 1.), maka *Media Center* Kota Dumai masih berada di tahap awal yaitu tahap penyediaan akses/perangkat (hasil wawancara dengan staf bagian Kominfo Sekretariat Daerah Kota Dumai, 14 September 2017).

Penelitian terkait *media center* telah banyak dilakukan sebelumnya. Bakri dan Unde (2015), misalnya, melakukan kajian terhadap *Media Center* Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. *Media center* ini awalnya merupakan gabungan dari Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten dengan Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang. Meski demikian, Sekretariat Daerah Kabupaten mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung *media center* yang sebelumnya berada di kantor. Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses kerja penyediaan dan pertukaran informasi antar instansi di daerah maupun masyarakat dan pemerintah. Salah satu faktor yang mendukung berkembangnya *media center* kabupaten ini adalah ketersediaan dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang terampil serta adanya legalisasi terhadap eksistensi *media center* ke dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

Penelitian lainnya terkait *media center* dilakukan oleh Andriariza (2016) yang mengevaluasi implementasi *Media Center*

Kota Bekasi dengan menggunakan sepuluh variabel, di antaranya: akses, cakupan, karakteristik dan sikap pelaksana, sumber daya, serta komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Salah satu kendala yang dihadapi oleh pengelola *Media Center* Kota Bekasi terkait dengan latar belakang disiplin ilmu pelaksananya yang lebih didominasi oleh lulusan Ilmu Komputer dibandingkan dengan lulusan Ilmu Komunikasi. Akibatnya, penguasaan kompetensi bidang komunikasi, terutama penulisan berita, dirasakan sangat minim. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pimpinan *Media Center* Dinas Kominfo Kota Bekasi berinisiatif memberikan *reward* kepada staf *media center* yang rajin membuat berita. *Reward* tersebut berupa diikutsertakannya staf tersebut ke dalam pelatihan atau bimbingan teknis yang diadakan oleh Kemkominfo.

Media center yang dihibahkan oleh Ditjen IKP Kemkominfo (pemerintah pusat) kepada pemerintah daerah merupakan ‘Urusan Pemerintahan Konkuren’, yang menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, Pasal 9 (3) dan (4), didefinisikan sebagai “...Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota”. Disebutkan pula di dalam pasal tersebut bahwa “Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah” Karena itu, efektif atau tidaknya pendirian *media center* sangat bergantung kepada komitmen pemerintah daerah sebagai pelaksana dari program tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,

sedangkan pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci (*key informant*) yang dipilih secara purposif. Pertanyaan bersifat terbuka untuk menggali informasi lebih dalam. Wawancara dilakukan selama kurang lebih 30 menit. Informan kunci penelitian ini terdiri dari:

1. Walikota Dumai
2. Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Dumai
3. Bagian Pos dan Telekomunikasi, Dinas Perhubungan Kota Dumai
4. Kontributor *Media Center* Provinsi Riau di Dumai

Rekaman wawancara kemudian dibuat transkripsinya untuk dianalisis lebih lanjut. Data disajikan dalam bentuk narasi atau deskripsi temuan-temuan yang signifikan. Analisis data kualitatif, menurut Moleong (2011), melibatkan tiga proses yaitu:

1. Deskripsi, yaitu proses mendeskripsikan hasil penelitian dengan teliti.
2. Klasifikasi, yaitu proses memilih dan memadukan data kembali ke dalam kategori-kategori berdasarkan konsep.
3. Sintesis, yaitu proses penarikan kesimpulan dengan melihat hubungan atau keterkaitan antar kategori-kategori yang muncul.

Di samping data primer, penelitian ini juga didukung dengan data sekunder seperti hasil penelitian lainnya untuk pengayaan analisis data penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nomenklatur Perangkat Daerah secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perlu diketahui bahwa berdasarkan PP tersebut, Komunikasi dan Informatika,

Persandian, Statistik merupakan bidang-bidang yang tergolong ‘urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar’ (Pasal 37). Sementara itu, nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika diatur dalam Peraturan Menteri (PM) Kominfo Nomor 14 Tahun 2016. Berdasarkan PM Kominfo tersebut, setidaknya ada tiga jenis penamaan perangkat daerah yang membidangi Kominfo, yaitu ‘Dinas’, ‘Bidang’ dan ‘Seksi’ (Pasal 2). Baik PP dan PM tersebut mengatur klasifikasi tipe Perangkat Daerah yang terbagi menjadi tiga, yaitu: tipe A (beban kerja besar); tipe B (beban kerja sedang); tipe C (beban kerja kecil).

Pada awal tahun 2017, sebanyak 34 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Dumai resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Razak, 2017). Salah satu OPD tersebut adalah Bagian Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Dumai. Bagian ini sebelumnya disatukan dengan Bagian Humas Setdako. Dengan terbentuknya Bagian Kominfo Setdako ini, pengelolaan *media center* tidak lagi berada di bawah Dinas Perhubungan. Meski demikian, Bagian Kominfo memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Walikota Dumai. Dalam struktur organisasi Setdako, terdapat tiga ‘asisten’ yang membidangi empat Bagian. Ketiga Asisten tersebut adalah:

- 1) Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- 2) Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan; serta
- 3) Asisten III Bidang Administrasi Umum.

Bagian Kominfo berada di bawah Asisten I Bidang Perekonomian dan Pembangunan, bersama dengan Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, dan Bagian Administrasi Pertanahan. Bagian Kominfo ini membidangi tiga Subbagian, yaitu:

- 1) Subbagian Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika;
- 2) Subbagian Perangkat Keras dan Jaringan Informasi, serta
- 3) Subbagian Pendayagunaan Data, Statistik dan Pemberdayaan Sistem. (Peraturan Walikota Dumai No. 45 Tahun 2016, Pasal 3).

Tugas utama Bagian Kominfo adalah “menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya” yaitu kewenangan dalam ketiga subbagian tersebut (Peraturan Walikota Dumai No. 45 Tahun 2016, Pasal 42). Fungsi yang dijalankan oleh Bagian Kominfo cukup kompleks, meskipun sifatnya mendukung proses pembuatan kebijakan Asisten II Setdako. Meski demikian, fungsi yang harus dijalankan Bidang Kominfo Setdako ini cukup luas, mulai dari pembuatan jaringan dan sistem (seperti Sistem Informasi Telematika/ SITEL maupun *e-government*) hingga urusan administrasi yang terkait dengan kepegawaian dan jabatan fungsional (seperti administrasi, evaluasi dan pelaporan program bidang kominfo; mengoordinasi bimtek atau pelatihan; termasuk juga menilai angka kredit fungsional Pranata Komputer) (Pasal 44-46).

Di samping tugas kompleks yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota tersebut, Bagian Kominfo juga harus bersiap untuk menyongsong program integrasi sistem *Smart City* yang dicanangkan oleh Walikota Dumai.

Awal Januari 2017, penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Walikota dengan pihak *Smart City Nusantara* (SCN) Plasa Telkom Jakarta Pusat dilakukan. Bila berhasil, Dumai menjadi kota pertama di Provinsi Riau yang menerapkan SCN. SCN ini berfungsi untuk mengefektifkan pelayanan masyarakat di antaranya perizinan, pajak, penerapan *e-tax*, *Smart PJU*, *Smart Government*, infrastruktur, akses *Magosky* untuk kelurahan dan kecamatan, puskesmas dan rumah sakit, dan lainnya (Daniel, 2017). APBD yang dipersiapkan untuk membangun *smart city* mencapai Rp2 miliar di tahun 2017 (Global Riau, 2017). Walikota Dumai pun bahkan melakukan kunjungan ke *Cerdas Command Center* (CCC) milik Pemkot Manado pada Oktober 2017 (Manadokota Online, 2017).

“Kita ada rencana membuat gedung command center, untuk mengintegrasikan seluruh aplikasi OPD yang ada di kota Dumai. Jadi ada aplikasi SIMDA (sistem informasi manajemen daerah), aplikasi e-budgeting, ada aplikasi pelayanan kesehatan, kita akan integrasikan menjadi satu. Jadi nanti pusatnya di command center itu” (Wawancara Kepala Bidang Kominfo, 14 September 2017).

Komitmen Walikota Dumai untuk membangun *Command Center* sebagai penopang *Smart City* terlihat dari studi banding yang dilakukan terhadap daerah-daerah lain yang telah mengimplementasikan hal serupa seperti Medan, Surabaya, dan Bandung, sepanjang tahun 2017. Di samping itu, lokasi *command center* pun juga menjadi perhatian Walikota.

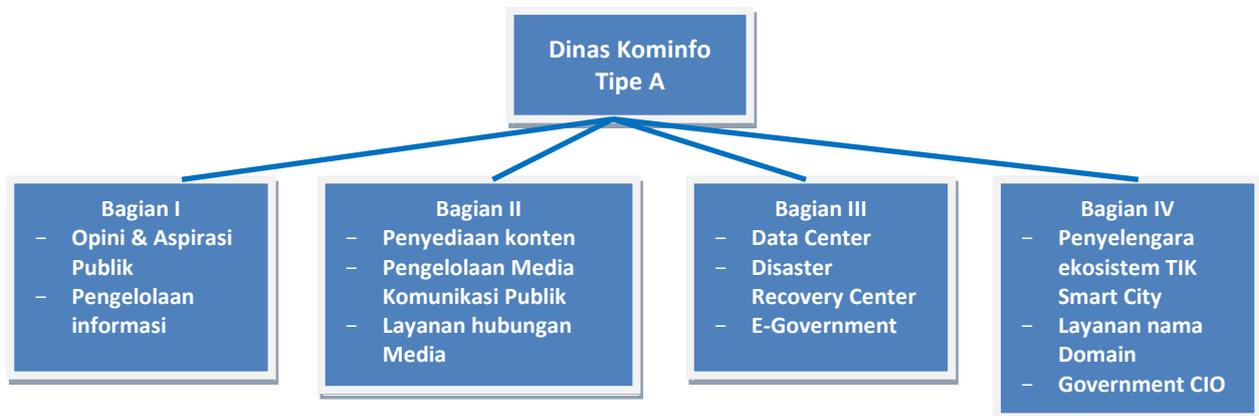
Besarnya perhatian Walikota terhadap program Smart City secara tidak langsung Dumai mengalami ketertinggalan bila dibandingkan dengan Provinsi Riau dan Kota Batam terkait *media center*.

“Jadi intinya gini, dulu kita baru-baru organisasi apa ini PD kita ini, nah kita tidak tahu arahannya tuh banyak tuh masing-masing departemen ada arahan-arahan. Nah kita buka, ada beberapa termasuk ini. kita bangun segera Kabag dalam volume besar, baru nanti menampung semua. jadi gitu tuh kemarin” (Wawancara dengan Walikota Dumai, 14 September 2017).

Status ‘Bagian Kominfo’ Setdako Dumai ini sudah selayaknya ditingkatkan menjadi ‘Dinas Kominfo’, dengan menimbang begitu kompleksnya tugas dan fungsi yang harus dijalankan. Idealnya, Dinas Kominfo yang nantinya dibentuk tersebut

telah mengurangi fokus terhadap *media center*, tetapi disadari sepenuhnya bahwa bertipe A, dengan empat bagian yang mendukung pengelolaan *media center* (Bagian Pengelolaan Informasi dan Bagian Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik) serta *smart city* (Bagan 1). Apabila Dinas Kominfo yang dibentuk bertipe B dan C, tidak ada bagian yang mengurus sejumlah hal, terutama penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*.

“[Dinas Kominfo] minimal tipe B karena fungsi statistik sudah masuk ke dalam sini kan, fungsi persandian belum. Dari bobot itu saja kita sudah dapat poin 876. Poin 601 saja sudah tipe C, kalo 801 saja sudah tipe B. nah kita sudah 876 poin sudah bisa tipe B.” (Wawancara Kepala Bidang Kominfo, 14 September 2017).



Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kabupaten/Kota Tipe A
Sumber : PM Kominfo No. 14 Tahun 2016

Meski demikian, bila status Bagian Kominfo ini tidak ditingkatkan menjadi Dinas Kominfo, pengelolaan *media center*

tetap harus berlangsung. Hal ini terkait dengan salah satu fungsi Subbagian Pendayagunaan Data, Statistik, dan

Pemberdayaan Sistem yakni “melaksanakan penyajian data/informasi publik secara elektronik”.

Ada sejumlah kendala yang muncul dalam pelaksanaan program-program Kominfo di daerah. Yang pertama adalah masalah komitmen Pimpinan Daerah dalam memberikan wewenang serta tupoksi bidang kominfo kepada instansi yang lebih relevan. Kedua, tidak proporsionalnya beban tanggung jawab dengan wewenang sebuah instansi, karena terkait dengan statusnya yang hanya “Bagian” (bukan “Dinas”). Kendala ketiga adalah ketidaktepatan penempatan sebuah program pada sebuah bagian atau seksi. Hal ini terjadi ketika *media center* dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota. Meski berada di bawah tanggung jawab Seksi Pos dan Telekomunikasi (Postel), penganggaran untuk kegiatan Kominfo tidak bisa terealisasi dengan baik.

“Ya, intinya Dishub saja di sini. Sementara di kota lain mungkin Diskominfo dan Kominfo bidang, memang disediakan satu bidang kominfo. Ya kita dibidang bidang kominfo gak ada, tapi postel. Postelnya pun terbatas paling cuma jasa titipan, tetapi disuruh juga bidang kominfo seperti MPLIK, tapi itulah terbengkalai.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana – eks Kepala Seksi Postel Dinas Perhubungan Kota Dumai, 15 September 2017).

Komitmen pimpinan tidak hanya sebatas perencanaan, tetapi juga dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung *media center*. Dalam Buku Pedoman *Media Center* yang dikeluarkan oleh Ditjen IKP tahun 2011, standar minimal sarana dan

prasarana tidak dijelaskan secara detail, melainkan sekadar:

- a. Ruang yang memadai.
- b. Letak ruangan/gedung mudah dijangkau oleh pengguna
- c. Akses/koneksi dengan jaringan internet.
- d. Penambahan sarana perangkat keras dan perangkat lunak sesuai kebutuhan pengguna
- e. Dukungan kendaraan operasional roda dua/roda empat.

Adapun Standar Minimal Sarana dan Prasarana *Media Center* Kota Dumai saat ini tampak dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Sarana dan Prasarana *Media Center* Kota Dumai

No	Prasarana dan Sarana	Keterse-diaan	Ket
1.	Aliran Listrik	Ada	
2.	Jaringan Internet	Ada	5 Mbps
3.	Akses <i>media center</i> dari pintu masuk gedung		Mudah dijangkau
4.	Lokasi ruang <i>media center</i>		Ruang khusus
5.	Luas ruang <i>media center</i> (M ²)		20 – 25 m ²
Cek fisik bantuan perangkat <i>media center</i>			
6.	<i>Personal Computer</i>	6 buah	Baik
7.	Laptop	TA	-
8.	<i>Printer</i>	1 buah	Baik
9.	Scanner	1 Buah	Baik
10.	UPS	6 buah	Baik
11.	Modem	TA	-
12.	<i>Wireless Adapter</i>	TA	-
13.	Router	TA	-

Sumber : Kuesioner Ceklis Prasarana & Sarana *Media Center*, Monev Direktorat PMP, Ditjen IKP.

Situs daring dan media sosial resmi yang dimiliki Bagian Kominfo saat ini hanyalah portal www.dumaikota.go.id. Hanya saja, *email* resmi tidak menggunakan domain pemerintah kota yaitu kominfo.dumai@gmail.com.

Kompleksitas tugas dan fungsi Bagian Kominfo tidak didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Bagian Kominfo Setdako Dumai saat ini memiliki pegawai sebanyak 14 orang, yang terdiri dari lima orang pegawai negeri sipil dan sembilan tenaga honorer (total 14 pegawai). Hanya tiga orang yang berlatar belakang pendidikan Bidang IT yang saat ini menduduki jabatan Sub Bagian (Eselon IV). Meski demikian, tidak ada staf yang berlatar belakang pendidikan bidang Komunikasi (Jurnalistik). Padahal, salah satu kontribusi *media center* adalah menyuplai berita dalam portal berita yang dikelola oleh Sub Direktorat Media Online, Direktorat Pengelolaan Media Publik, Ditjen IKP, infopublik.id. Tugas menulis berita idealnya dikerjakan oleh staf yang memiliki skill untuk menulis berita. Karena itu, pengelola *media center* sebaiknya memiliki kemampuan dasar di bidang jurnalistik, yakni kemampuan untuk mengolah data dan fakta menjadi berita yang dapat disajikan – baik berupa foto maupun berita teks – yang diperuntukkan bagi media daring. Dari rekapitulasi kontribusi *media center* daerah seluruh Indonesia di dalam portal media *online* infopublik (lih. Tabel 2.), *Media Center* Kota Dumai hanya mengirim enam berita di tahun 2016 dan hanya lima berita yang dipublikasikan di portal www.infopublik.id di tahun yang sama.

Tabel 2. Rekapitulasi Konten *Media Center* dalam www.infopublik.id

Tahun	Berita		Foto
	Jumlah	Publish	Jumlah
2015	29.971	26.044	5.718
2016	33.373	26.374	9.668
2017*	22.460	16.493	5.174

* rekapitulasi bulan Januari-Juli

Sumber: data diolah oleh Dit. PMP, Ditjen IKP

Sejak 2015, hanya satu orang dalam Bagian Kominfo yang pernah mengikuti pelatihan jurnalistik *online* di Semarang. Kekurangan SDM yang menangani bidang jurnalistik membuat ketersediaan konten dalam portal web www.dumaiportal.go.id sangat bergantung pada staf Bagian Humas Setdako.

“Humas juga punya website sendiri, humasdumai.com. Yang .go.id (portal Pemkot Dumai) yang ngelola kita Kominfo. Jadi karena kita gak punya jurnalis, sebelumnya mereka (humas) yang liput. Jadi kita berikan ID untuk mengupload berita. Saat ini agak tersendat karena mereka punya website sendiri. Jadi kami meng-copas berita dari Humas dan diupload ke portal dumaiportal.go.id” (Wawancara dengan staf Bagian Kominfo Setdako Dumai, 14 September 2017).

Humas, secara umum, merupakan kegiatan manajemen komunikasi yang bertujuan untuk membentuk atau mempertahankan citra positif terhadap institusi atau lembaga yang menaunginya. Tugas Humas Pemerintah (Pusat maupun Daerah) adalah memberi informasi tentang kebijakan pemerintah sekaligus menyediakan layanan publik. Humas Pemerintah memiliki peranan yang penting dan strategis, terutama ketika memberikan sanggahan terhadap pemberitaan yang salah dan merugikan pemerintah (Lubis, 2012). Oleh karena itu, berita yang ditampilkan Humas pun pasti berbeda dengan berita yang ditampilkan di media daring www.infopublik.id. Humas Setdako lebih mengutamakan pemberitaan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota Dumai. Sementara, www.infopublik.id

menyajikan berita yang lebih variatif dan tidak sekadar berita seremonial kegiatan Kepala Daerah.

“Pengelolaan dumaiportal.go.id itu kan PADEnya (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik) ke Kominfo, berita di Humas. Mau gak mau kominfo yang urus, ilmu jurnalisnya gak ada. Nah, saya mikir-mikir nih sebenarnya go.id (portal Pemko Dumai) berapa persen informasi pemerintah dan informasi masyarakat? Kita gak punya pengetahuan nih” (wawancara dengan staf Bagian Kominfo Setdako Dumai, 14 September 2017).

Idealnya, wartawan atau kontributor yang mengisi konten baik di portal pemerintahan Kota Dumai (www.dumaikota.go.id) maupun portal www.infopublik.id, harus memahami berita-berita kegiatan pemerintahan daerah secara keseluruhan. Bukan hanya berita mengenai kegiatan kepala daerah yang bertujuan untuk menyosialisasikan program pemerintah daerah tetapi juga berita tentang kegiatan pemerintah pusat. Dalam hal ini, produksi konten berita merupakan tupoksi dari Humas.

“Itu kan masih rancu, dulu masih menyatu Humas dan Kominfo. OPD baru, lalu dipecah. Jadi (Bagian) Kominfo yang baru ini kan masih meraba-raba nih kerjaan mereka. Pemberitaan kan di humas. Yang saya nilai Humas itu kan kegiatan Sekretariat Kota, kalau OPD-OPD ujung-ujungnya dari (Bagian) Kominfo. Wartawan gak perlu capek-capek lagi, tinggal ambil berita di sana aja (Media Center)” (Wawancara dengan kontributor Media Center Provinsi Riau di Dumai, 15 September 2017).

Permasalahan mendasar lainnya akibat perubahan nomenklatur serta peralihan *media center* dari Dishub Kota menuju Bagian Kominfo Setdako Dumai adalah penganggaran untuk pengelolaan *media center* ini.

“Yang jadi pikiran kita ini ... di tempat kita itu ada 3 subbag, sepertinya tuh belum nyangkut gitu loh. Pos (penganggaran) belum nyangkut. Tupoksinya gak nyangkut. Kemana mau disangkutkan? Setelah kita berbincang-bincang dengan Pemprov, katanya di bagian Informasi Publik. Nah, di tempat kita, tidak ada bagian itu” (Wawancara dengan staf Bagian Kominfo Setdako Dumai, 14 September 2017).

Bagian Kominfo merupakan salah satu dari 12 bagian yang ada di Setdako Dumai. Perlu dicatat bahwa Bidang Kominfo tidak berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat, meskipun termasuk urusan pemerintahan wajib. Karena itu, hal ini berpengaruh juga pada proses penganggaran tiap tahun.

“Kita belum bisa menganggarkan banyak karena bagian kita penganggarnya melalui sekretariat daerah. Gak bisa langsung bawa anggaran sendiri. Gak bisa. Kita mengusulkan (kegiatan) ke Sekretariat, sekretariat mau mengakomodir atau tidak. Belum diusulkan udah dicut dulu alasannya kan sekretariat dapat anggaran segini nih dibagi menjadi 12 bagian. Dilihat dulu ini mana yang paling banyak kegiatannya.. ya (Bagian) umum dulu lah, baru kedua Kesralah, ketiga di Humas.” (wawancara Kepala Bidang Kominfo, 14 September 2017).

Kendala anggaran untuk pengelolaan *media center* juga dialami ketika *media center* ini berada di bawah tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Dumai pada tahun 2015-2016. Kala itu, penerima bantuan *media center* adalah Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi (Postel), Bagian Perhubungan Udara, Dishub Kota.

“*Karena saking uniknya kita seksi Postel jadi perhatian dan anggaran ke Kominfo kurang, bisa dibilang gak ada. Ada beberapa kali kegiatan Kominfo, kita diundang tapi kita gak datang. Syukurnya waktu pas dapet hibah itu, kemarin itu kebantu juga sama ada tim website dinas jadi beberapa kali upload dari tim kita itulah untuk beritanya. Itu dia kemarin karena keterbatasan anggaran jadi agak susah juga. Pimpinan juga tidak support, bisa dikatakan tidak totalitas lah.*” (wawancara dengan Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana – eks Kepala Seksi Postel Dinas Perhubungan Kota Dumai, 15 September 2017).

Karena ketiadaan anggaran, tim *website* Dinas Perhubungan inilah yang membantu pengelolaan *media center* dengan seadanya, tanpa ada dokumen legal berupa Surat Keputusan (SK) Tim. Alhasil pola kerjanya pun sebatas hanya *stand by* di ruangan *media center*. Sementara, pembuatan konten berita hanya salin tempel dari *website* Dishub (dishub.kotadumai.go.id). Akibatnya, berita yang dikirim ke portal infopublik didominasi oleh kegiatan Kepala Dishub Kota, sementara kegiatan OPD lainnya tidak ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tantangan terbesar dari keberlangsungan *Media Center* Kota Dumai

di masa peralihan ini adalah komitmen pimpinan terutama Walikota Dumai yang masih belum sepenuhnya mendukung urusan pemerintahan yang sifatnya konkuren. Perhatian Walikota Dumai masih terfokus pada pembangunan infrastruktur *Smart City Nusantara*. Hal ini terlihat dari minimnya anggaran yang dikelola oleh Bagian Kominfo Pemerintah Kota Dumai. Keterbatasan anggaran inilah yang menyebabkan pengelolaan *media center* tidak maksimal. Beban kerja yang kompleks tidak bisa lagi dikerjakan dalam satuan kerja berbentuk “Bagian”.

Tantangan lainnya berasal dari minimnya tenaga SDM yang memiliki kemampuan jurnalistik sehingga pembuatan konten berita masih mengandalkan tenaga kehumasan Sekretariat Kota Dumai. Hal ini tentu berdampak pada pola kerja pengisian konten di web portal Kota Dumai dan pada akhirnya berdampak pada kontribusi *media center* kepada portal www.infopublik.id.

Agar program *media center* ini berjalan dengan efektif sebagai wadah diseminasi dan layanan informasi publik, maka penelitian ini memberi sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Pusat (Ditjen IKP Kemkominfo) serta Pemerintah Daerah Kota Dumai sebagai berikut. Ditjen IKP perlu melakukan intervensi kepada pengelola *Media Center* Kota Dumai, khususnya pembuat konten. Intervensi yang dimaksud adalah penunjukan petugas dan pengangkatan petugas tersebut dalam bentuk SK Walikota. Petugas ini kemudian akan dilatih kemampuan jurnalistik secara bertahap hingga *media center* bisa berjalan dengan mandiri. Pemerintah Kota Dumai perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan status kelembagaan Bidang Kominfo Setdako

menjadi Dinas Kominfo Tipe B. Pertimbangan utamanya adalah kompleksitas beban kerja fungsi Bagian ini yang memerlukan tenaga SDM yang berkualitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Pengelolaan Media Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu terkait pengumpulan data penelitian di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriariza, Y. (2016). Evaluasi Implementasi *Media Center* di Kota Bekasi. *Jurnal Pekommas*. Vol. 1(2), Hal. 133-140.
- Bakri, A., dan Unde, T.B. (2015). *Media Center* Sebagai Pusat Pelayanan Informasi Publik dalam Penyebarluasan Aktivitas Pemerintahan kepada Masyarakat di Kabupaten Pinrang. *Jurnal Komunikasi KAREBA*. Vol. 4(2), Hal. 189-207.
- Buku Pedoman Umum Media Center, Ditjen IKP tahun 2011.
- Daniel (2017). *Dumai Kota Pertama di Riau Terapkan Smart City*. Diakses pada 26 Januari 2018 dari website: <https://detakindonesia.co.id/read/news/j4RD5LWv/dumai-kota-pertama-di-riau-terapkan-smart-city>.
- Global Riau. (2017). *Dumai Goes to Smart City Sampai Dimana?*. Diakses pada 26 Januari 2017 dari website: <http://globalriau.com/dumai/Dumai-Goes-to-Smart-City-Sampai-Dimana--2>
- Lubis, E.E. (2012). Peran Humas dalam Membentuk Citra Pemerintah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 12 (1), Hal.51-73
- Manadokota Online. (2017). Walikota Dumai Apresiasi Sistem Pemantauan Digital Cerdas Command Center Manado. Diakses pada 26 Januari 2018 dari website: <https://manadokota.go.id/index.php/2017/10/12/walikota-dumai-mengapresiasi-dan-kagum-dengan-ruang-pusat-kendali-digital-cerdas-command-center/>.
- Media Center Riau. (2015). Kemkominfo Bantu Dishub Dumai Perangkat Informatika Komputer. Diakses pada 16 Januari 2018 dari website: <http://mediacenter.riau.go.id/read/12922/kemkominfo-bantu-dishub-dumai-perangkat-infor.html>.
- Moleong, L.J. (2011) *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Rosda. Bandung.
- Peraturan Menteri (PM) Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Peraturan Menteri (PM) Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.
- Peraturan Menteri (PM) Komunikasi dan Informatika No. 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian

Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai.

Razak, A. (2017). *Berikut Pembagian 34 OPD Baru Pemko Dumai*. Diakses pada 26 Januari 2018 dari website: <https://www.antarariau.com/berita/84284/berikut-pembagian-34-opd-baru-pemko-dumai->.

Website Infopublik (2016). *Kominfo Bantu Pemkab Bengkalis Perangkat Media Center*. Diakses pada 9 Mei 2018 dari website: <http://www.infopublik.id/read/147578/kominfo-bantu-pemkab-bengkalis-perangkat-media-center.html>.

